

## PENGARUH IPM, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019

Nuraeni Handayani✉

Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economic and Business,  
Universitas Diponegoro

✉nuraenihandayani@students.undip.ac.id

### *Abstract*

**Tujuan:** *Central Java Province is a province with a poverty rate percentage that ranks second in Java after DIY, but the poverty rate in Central Java Province is still quite high because it is still above the national poverty rate. This study aims to analyze the effect of the Human Development Index (HDI), economic growth and unemployment rates in districts/cities in Central Java Province in 2017-2019.*

**Metode:** *Based on the data used, in this study using panel data regression analysis with the fixed effect method which was tested using the Eviews 9.0 application. The data used in this study is secondary data. The independent variables used in this study are the Human Development Index (HDI), economic growth and unemployment rates, while the dependent variable used is the poverty rate in 35 regencies/cities in Central Java Province in 2017-2019.*

**Hasil:** *The results of this research that the Human Development Index (HDI) had a positive effect on the poverty rate in districts/cities in Central Java Province in 2017-2019. Variables of economic growth and unemployment had no significant effect on the poverty rate. The variables of the Human Development Index (HDI), economic growth and the unemployment rate together have a significant effect on poverty in Central Java Province in districts/cities in Central Java Province in 2017-2019.*

**Kata Kunci:** *poverty, human development index (HDI), economic growth, unemployment rate*

### PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).

Konsep kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (2000) adalah kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Berdasarkan pendekatan ini, BPS merumuskan kemiskinan sebagai

ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengeluaran per kapita per bulan dipakai sebagai variabel yang akan dibandingkan dengan besarnya nilai garis kemiskinan (GK) untuk menentukan seseorang dikategorikan miskin atau tidak miskin. Seseorang yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan, dikategorikan sebagai penduduk miskin. ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)).

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Permasalahan kemiskinan terjadi hampir di semua daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Persentase penduduk miskin di Pulau Jawa masih relatif tinggi. Provinsi DI Yogyakarta dari tahun 2017-2020 memiliki rata-rata penduduk miskin sebesar 11,87 persen yang merupakan persentase tertinggi dibandingkan Provinsi lain di Pulau Jawa. Peringkat kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 11.33 persen, peringkat ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 10,75 persen, peringkat keempat ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 9,97 persen, peringkat kelima ditempati oleh Provinsi Banten dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 5.26 persen dan yang terakhir ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 3,58 persen.

Kondisi kemiskinan di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (problem nasional), yakni masih tingginya jumlah penduduk miskin jika di bandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Kemiskinan merupakan issue strategis dan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Hal tersebut terbukti selain di dalam Renstra Jawa Tengah (Perda No. 11/2003), Pergub 19 tahun 2006 tentang Akselerasi Renstra, Keputusan Gubernur No. 412.6.05/55/2006 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) juga di dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah tahun 2005-2025, kemiskinan merupakan salah satu dari issue strategis yang mendapat prioritas untuk penanganan pada setiap tahapan pelaksanaannya (Sukmaraga, 2011).

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas (Sukmaraga, 2011). Persentase IPM di Jawa Tengah Tahun 2017-2019 diatas terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 yaitu 70,52%. Pada tahun 2018 indeks pembangunan manusia adalah 71,12%, sedangkan pada tahun 2019 adalah 71,73%.

Menurut Todaro (2000) Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional. Menurut Zuhdiyaty (2017) Pertumbuhan ekonomi yang ada nantinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru sehingga berkurangnya pengangguran yang ada, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang nanti akan dapat mengurangi kemiskinan yang ada.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Pendapatan akan mencapai maksimum apabila kondisi tingkat pengangguran tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara (Rahmawati, 2017).

Menurut Sadono Sukirno (2006), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah sebesar 4,63%, kemudian turun menjadi 4,57% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah sebesar 4,47% dan turun kembali pada tahun 2019 menjadi 4,44%.

Bedasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian di Provinsi Jawa Tengah dengan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran pada penelitian ini. Dengan demikian maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kemiskinan**

Menurut Arsyad (1999), kemiskinan dapat terjadi karena anggota masyarakat tidak atau belum berpartisipasi dalam proses perubahan yang disebabkan ketidakmampuan dalam kepemilikan faktor produksi atau kualitas yang kurang memadai. Sementara menurut Sen dalam Todaro dan Smith (2006), kemiskinan bukan suatu kondisi kekurangan suatu komoditi ataupun masalah kepuasan dari komoditi tersebut namun kemiskinan lebih cenderung merupakan kondisi masyarakat yang kurang dapat memaksimalkan fungsi dan mengambil manfaat dari komoditi tersebut.

Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP 1.55 dolar AS per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong 'miskin dari segi pendapatan' dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia (World Bank, 2007).

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Badan Pusat Statistik (2021), IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Dalam Safuridar & Putri (2019) dijelaskan bahwa IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia, yaitu :

1. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
2. IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat/penduduk.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sadono Sukirno (2006) terdapat empat faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, ke empat faktor tersebut adalah:

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya
2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja
3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi
4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Menurut Tambunan (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan

cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

### **Pengangguran**

Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 2007).

Menurut Sadono Sukirno (2000) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.

Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

### **Penelitian Terdahulu**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada penelitian sebelumnya. Whisnu Adi Saputra (2011), Prima Sukmaraga (2011), dan Noor Zuhdiyaty dan David Kaluge (2017) menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel pertumbuhan ekonomi menurut Asrianti (2017) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel Tingkat pengangguran berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prima Sukmaraga (2011), Dicky Wahyudi dan Tri Wahyu Rejekiingsih (2013), Asrianti (2017), Irhamni (2017) dan Zalecha Noor Afda (2018) memiliki hasil yang sama yaitu tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (variabel dependen) dan tiga variabel bebas (variabel independen). Adapun definisi dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan, merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2017

hingga 2019. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam satuan persen.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dinyatakan dalam Presentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2017 hingga 2019. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam satuan persen.
3. Pertumbuhan Ekonomi (PE) , dalam penelitian ini dinyatakan dalam laju pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2017 hingga 2019. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam satuan persen.
4. Pengangguran, dalam penelitian ini dinyatakan dalam nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2017 hingga 2019. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam satuan persen.

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel (*pooled data*) yang diolah menggunakan alat pengolahan data berupa aplikasi *Eviews 9.0*. Analisis dengan menggunakan data panel merupakan kombinasi antara deret waktu time series dan deret lintang cross section (Gujarati, 2010). Data cross section yang diambil dalam penelitian ini adalah data dari 35 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan data time series yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari tahun 2017-2019. Mengingat data panel merupakan gabungan dari data time series dan cross section, maka model dapat ditulis dengan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it}$$

$$t = 1, 2, \dots, T ; \text{ dan } i = 1, 2, \dots, N$$

Keterangan :

T = Banyaknya waktu

N = Banyaknya observasi

N x T = Banyaknya data panel

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa, terletak diantara dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Luas Jawa Tengah 32.544,12 km<sup>2</sup> atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Cilacap merupakan kabupaten terluas yang ada di Jawa Tengah dengan luas 2.138,51 km<sup>2</sup> sedangkan Kota Magelang yang terkecil dengan luas 18,12 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi

573 kecamatan. Pada tingkatan yang lebih rendah, terdapat 7.809 desa dan 750 kelurahan. Banyaknya jumlah kelurahan/desa menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia (Statistik Daerah Jawa Tengah 2016, 2016).

Kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2020-2021. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebanyak 3.980,90 ribu jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 4.109,75 ribu jiwa. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 7,69 tahun, kemudian naik pada tahun 2021 menjadi 7,75 tahun. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2020 adalah 12,70 tahun dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 12,77 tahun. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita disesuaikan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 10.930 ribu rupiah/orang/tahun dan naik pada tahun 2021 sebesar 11.034 ribu rupiah/orang/tahun.

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 2 yaitu yang bekerja dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 17.602.917 orang dan pada tahun 2020 turun menjadi 17.536.935 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 68,85% dan naik pada tahun 2020 menjadi 69,43%.

### **Pemilihan Model Terbaik**

Regresi data panel menyediakan tiga kemungkinan model yang dapat digunakan yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Penelitian menggunakan data panel memiliki tiga kemungkinan metode yang dapat digunakan yaitu model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Untuk menentukan model terbaik dilakukan uji *Chow* dan uji *Hausman*. Berdasarkan hasil regresi, model yang lebih baik digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*. Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka atau *dummy* yang dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV) atau disebut juga Covariance Model. Pada metode *fixed effect* estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weight*) atau (LSDV) dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section*.

### **Interpretasi Hasil dan Pembahasan**

Penelitian mengenai analisis pengaruh IPM, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan analisis regresi data panel model *fixed effect*.

Hasil uji regresi data panel dengan metode *fixed effect* antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah tahun 2017-2019, dengan pengaruh negatif. Hal ini sesuai dengan teori Todaro (2000) yang mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerimaan IPM tiap daerah maka semakin menurun tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Dan sebaliknya jika penerimaan IPM rendah, maka kemiskinan di daerah tersebut akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Whisnu Adhi Saputra (2011), Prima Sukmaraga (2011), dan Noor Zuhdiyaty dan David Kaluge (2017) juga menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil uji regresi data panel dengan metode *fixed effect* nilai signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.7672 yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah tahun 2017-2019. Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan teori dari Tambunan (2001) yang mengatakan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Pertumbuhan Ekonomi efektif namun tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah karena memiliki pengaruh negatif yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin menurunnya tingkat kemiskinan. Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk (Saputra, 2011). Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Wahyu Rejekiingsih (2013) dan Noor Zuhdiyaty dan David kaluge (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Hasil uji regresi data panel dengan metode *fixed effect* antara tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat Pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah tahun 2017-2019. Hasil dari uji regresi ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lincoln Arsyad (1999) yaitu Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran, dengan jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Salah satu mekanisme pokok untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang adalah memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan

kerja bagi kelompok masyarakat miskin, Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Whisnu Adhi Saputra (2011), Rahmawati (2017), Noor Zuhdiyaty dan David Kaluge (2017), Giovanni (2018) dan Safuridar dan Natasya Ika Putri (2019) dengan hasil pengujian yang menyatakan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil uji regresi regresi data panel dengan metode *fixed effect* antara IPM, PE dan TPT terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan Nilai F-statistik dari hasil estimasi model utama sebesar 98.37649 sehingga diperoleh hasil  $98.37649 > 3.09$  yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. IPM, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Noor Zuhdiyaty dan David Kaluge (2017) yang berjudul “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kamiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (studi kasus pada 33 Provinsi)*” dengan hasil penelitian bahwa IPM, PE dan TPT secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diambil beberapa simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan taraf signifikansi sebesar 5%, dimana ketika Indeks Pembangunan Manusia meningkat, maka tingkat kemiskinan menurun
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan taraf signifikansi sebesar 5%.
3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan taraf signifikansi sebesar 5%.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran secara bersama - sama (simultan) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Nilai R-square sebesar 0.981926. Artinya 98,19 persen tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel IPM, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

## Saran

Berdasarkan hasil pengujian analisis penelitian, dapat di ambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Implikasi Kebijakan
  - a. Dalam mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah, pemerintah sebaiknya memprioritaskan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan pelayanan dalam pendidikan merupakan salah satu cara dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Peningkatan pelayanan pendidikan seperti pembangunan sarana dan prasarana sekolah, pemberian beasiswa bagi

penduduk kurang mampu, pembebasan uang sekolah, maupun pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi.

- b. Perlunya peningkatan pelayanan pada fasilitas kesehatan juga mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia seperti pemberian pelayanan BPJS non PBI bagi masyarakat yang kurang mampu dan perbaikan sarana dan prasarana tempat pelayanan kesehatan.

## 2. Penelitian Selanjutnya

- a. Bagi penelitian selanjutnya perlu menambah, mengurangi atau mengganti variabel-variabel tersebut dengan variabel-variabel lain yang dimungkinkan lebih relevan dengan tingkat kemiskinan.

## REFERENSI

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- . 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2021. *Konsep Kemiskinan dan Ketimpangan*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. diakses pada 4 Agustus 2021 Pukul 13.12
- . 2021. *Konsep Indeks Pembangunan Manusia*. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>. diakses pada 15 Agustus 2021 Pukul 20.19
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistika Daerah Jawa Tengah 2016*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. *Persentase Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-2020*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/26/83/1/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-.html>. diakses 12 Agustus 2021 Pukul 16.30
- . 2021. *PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2020*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/157/123/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-menurut-kabupaten-kota.html>. diakses 12 Agustus Pukul 17.15
- . 2021. *Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2020*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/98/1/tingkat-pengangguran-terbuka-data-semesteran-.html>. diakses 13 Agustus 2021 Pukul 13.45
- Baltagi, B. H. 1995. *Econometric Analysis of Panel Data*. (J. Wiley & Sons, Eds.) Edisi Ketiga. USA: British Library.
- Dama, H. Y., Lopian, A. L. C., & Sumual, J. I. 2016. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 549–561.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Afda, Z. N. (2018). *Analisis determinan kemiskinan di Jawa Tengah*. Universitas Islam Indonesia.
- Asrianti. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. In *Skripsi* (Vol. 51, Issue 1).
- Giovanni, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan

- terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31.
- Irhamni. (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nanga, M., Aulia, F. M., HW, E. F., Rahayuningsih, D., Dinayanti, E., Rismalasari, M., Hafid, M., Wahyu, R., Putra, R. R., Kartika, V., & Widaryatmo. (2018). *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*. Kedepujian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas.
- Octaviani, D. (2001). Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke. *Media Ekonomi*, 7(8).
- Rahmawati, K. D. (2017). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di DIY Periode 2006-2013*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Rini, A. S., Sugiharti, L., & Airlangga, U. (2016). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 01(2), 17–33.
- Safuridar, & Putri, N. I. (2019). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia , Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Aceh Bagian Timur*. 3(1), 34–46.
- Saputra, W. A. (2011). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (Edisi Kedu). Kencana Prenada Media Group.
- Sukmaraga, P. (2011a). *ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA , PDRB PER KAPITA , DAN JUMLAH PENGANGGURAN*. Universitas Diponegoro.
- Sukmaraga, P. (2011b). *ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA , PDRB PER KAPITA , DAN JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAWA TENGAH*. Universitas Diponegoro.
- Wahyudi, D., & Rejekingsih, T. W. (2013). Analisis Konsentrasi Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(1).
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.25-42>
- World Bank. (2007). *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. The World Bank.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2). <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42>